

Prosiding BPTP Karangploso No. 4

ISSN: 1410-9905

PROSIDING

LOKAKARYA PEMANTAPAN

GEMA PALAGUNG 2001

JAWA TIMUR

Malang, 31 Agustus - 1 September 2000



Jawa Timur

631.14
BAL
p



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KARANGPLOSO
2000

Th
3/10 2000

PROSIDING

LOKAKARYA PEMANTAPAN GEMA PALAGUNG 2001 JAWA TIMUR

Penyunting:

Dr. F. Kasijadi
Ir. Roesmiyanto
Ir. MC. Mahfud, MS.

PERPUSTAKAAN BPJP JAWA TIMUR	
Kode Buku	No. Induk : 380
631.14 BAL P	Tanggal : 10-1-2000
	Asal : pembelian

Penyunting Pelaksana:

Drs. Martinus Sugiyarto, MP
Dra. Endang Widajati
Budi Santosa
Djoko Siswanto



DEPARTEMEN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KARANGPLOSO
2000

DAFTAR ISI

SAMBUTAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR		iii
SAMBUTAN KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KARANGPLOSO		vi
DAFTAR ISI		ix
UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI PALAGUNG DI JAWA TIMUR	Diperta Tk. I Prop.Jatim	1
PELAKSANAAN GEMA PALGUNG 2001 DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI DI KABUPATEN BANYUWANGI	Diperta Dati II Kabupaten Banyuwangi	5
PAKET TEKNOLOGI USAHATANI PADI SPESIFIK LOKASI DI JAWA TIMUR	Suwono, dkk	12
PAKET TEKNOLOGI USAHATANI JAGUNG SPESIFIK LOKASI DI JAWA TIMUR	S. Roesmarkam, dkk	50
PAKET TEKNOLOGI USAHATANI KEDELAI SPESIFIK LOKASI DI JAWA TIMUR	Roesmijanto, dkk	65
PRAKIRAAN SERANGAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN PADI	Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	83
DUKUNGAN KOPERASI/PPM DALAM PELAKSANAAN KUT UNTUK PALAGUNG 2001 DI JATIM	Kanwil Dep.Kop Prop Jatim	109
EVALUASI PELAKSANAAN PROYEK PKPM.MP.MP JAWA TIMUR DI MASING-MASING KABUPATEN DAN SARAN PERBAIKANNYA	Sekretariat Satuan Pembina Bimas Propinsi Jatim	113
EVALUASI PELAKSANAAN DAN UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PENYULUHAN GEMA PALAGUNG DI JAWA TIMUR	BIPP Kabupaten Dati II Banyuwangi	126
DUKUNGAN TERSEDIAANYA BENIH BERLABEL DARI VARIETAS UNGGUL DALAM PALAGUNG DI JATIM	BPSBTPH	139
DUKUNGAN TERSEDIAANYA PUPUK DALAM PELAKSANAAN GEMA PALGUNG DI JATIM	PT.PUSRI	149
UPAYA MENDUKUNG PEMASARAN HASIL PALAGUNG DI JATIM	Kanwil Deperindag Prop.Jatim	152
DAFTAR PESERTA		158

DUKUNGAN KOPERASI/LSM DALAM PELAKSANAAN KUT UNTUK PALAGUNG 2001 DI JAWA TIMUR

*Kantor Wilayah Departemen Koperasi, PK dan Menengah
Propinsi Jawa Timur 1999*

I. Pengertian dan Tujuan

1. KUT (*Kredit Usaha Tani*)

Adalah kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Pemberi Kredit Kepada Koperasi Primer atau LSM untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani, guna membiayai usahatani dalam rangka Intensifikasi padi, palawija dan hortikultura.

2. Tujuan Program KUT

- Mendorong peningkatan produksi pangan
- Memperluas kesempatan usaha dan penyerapan tenaga kerja
- Meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan menanggulangi kemiskinan
- Mendorong tumbuhnya berbagai sektor kegiatan ekonomi di pedesaan.

3. Sukses Program KUT

- a. Sukses penyaluran; Kinerja daya serap petani dalam memanfaatkan plafond KUT yang disediakan oleh pemerintah
- b. Sukses Penggunaan; Kinerja dalam mencapai peningkatan produktivitas usahatani dan total produksi pangan
- c. Sukses Pengembalian; Kinerja sisa pinjaman dan tunggakan KUT.

II. Kebijakan Penyaluran KUT

Dengan dihapuskannya subsidi pupuk (untuk tanaman pangan) maka untuk meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai pemerintah mengkompensasi penghapusan subsidi harga pupuk yang selama ini telah dinikmati oleh petani peserta KUT dengan:

1. Menaikan harga dasar gabah kering giling (GKG) pada MP. 1999 dari Rp. 1.000,- menjadi Rp. 1.400,-/kg ditingkat Koperasi/LSM dengan persyaratan kualitas sebagai berikut:

No.	Harga Pembelian/Persyaratan Kualitas	Rupiah/kg		
		GKG	GKS	GKP
1	Harga pembelian oleh koperasi /LSM dari petani	Rp. 1.400,-	Rp. 1.200,-	Rp. 1.020,-
2	Persyaratan (kualitas)			
	Kadar air (max)	14%	18%	25%
	Kotoran/hampa	3%	6%	10%
	Butir hijau/mengapa	5%	7%	10%
	Butir kuning/rusak	3%	3%	3%
	Butir merah	3%	3%	3%

2. Plafond KUT untuk padi dinaikan dari Rp. 1.496.250,- menjadi Rp. 2.000.000,-/Ha dan sejak TA. 1999/2000 (tanggal 1 April 1999) Rp. 2.762.500,-/Ha demikian halnya dengan komoditas lainnya yang dibiayai dari KUT.
3. Suku bunga KUT diturunkan dari 14% menjadi 10,50% per tahun dengan distribusi sebagai berikut:

No.	Distribusi Bunga	Semula %	Menjadi%
1	Bank Indonesia	3,00	-
2.	Bank Pelaksana	2,00	2,0
3	Koperasi/LSM	5,00	5,00
4	Perum PKK	1,50	1,50
5	PPL	1,00	1,00
6	Cadangan (dititipkan di Perum PKK)	1,50	1,00
	Jumlah	14,00	10,50

4. Pola penyaluran KUT (Status Bank Pelaksana) berubah dari Executing menjadi Channeling sehingga Koperasi dan LSM sebagai Executing Agent yaitu sebagai Pelaksana Pemberi KUT.
5. Dampak dari Kebijakan Pemerintah, diharapkan menaikkan pendapatan petani dan ketersediaan pupuk akan lebih terjamin dengan harga yang lebih kompetitif.
6. Persyaratan Kelonggaran Tunggakan KUT
 - MT. 1995/1996 s/d MT. 1997 direschedulling selama 4 MT atau 2 Tahun Penyediaan, sehingga yang semula jatuh tempo 31 Maret 1998 diperpanjang s/d tanggal 31 Maret 2000 dan bunga KUT MT. 1997 dihentikan sejak tanggal 1 April 1998.
 - Kelonggaran tunggakan KUT untuk MT. 1997/1998 dan MT. 1998 dari 20% menjadi 50% dan untuk MT selanjutnya disesuaikan dengan kondisi yang akan datang.
 - Tunggakan KUT MT. 1985 s/d 1995 dihapus bukukan dan dihapus tagihkan, Tunggakan KUT MT selanjutnya harus lunas.

III. Penyaluran dan Pemanfaatan KUT.

1. Alokasi Plafond KUT TP. 1998/1999 (tanggal 1 Oktober 1998 s/d 30 September 1999) untuk Jawa Timur sebesar Rp. 1.918 trilyun, yaitu untuk Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura.
2. Penyerapan KUT s/d tanggal 26 Agustus 1999 Rp. 1.626 Trilyun (84,78%) dari alokasi plafond TP. 1998/1999, yang disalurkan untuk :
 - Koperasi : 1.457 Kop
 - L S M : 111 LSM
 - Luas areal : 1.190.771 Ha
 - Jumlah kelompok tani : 37.421 kelompok
 - Jumlah Petani : 1.082.532 Orang

3. Pemanfaatan KUT

- Tanaman Padi
- Tanaman Palawija
- Tanaman Hortikultura (Tanaman buah-buahan, sayuran, obat-obatan dan tanaman hias).

IV. Institusi dan Mekanisme Pengendalian

1. Institusi yang terlibat dalam penyerapan dan pengembalian KUT, yaitu :

- 1.1. Bank Indonesia (Penyediaan dana /KLBI)
- 1.2. Bank Pelaksana (Penyalur kredit /Channeling Agent)
- 1.3. Perum PKK (Penjamin KUT 1,5%)
- 1.4. Koperasi/LSM (Pemberi Kredit/Executing Agent)
- 1.5. PPL (Pembimbing Kelompok Tani dalam Penyusunan RDKK dan bertanggung jawab atas kebenaran RDKK)
- 1.6. BKSLP5K (Badan Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Program Peningkatan Produksi Pangan dan Pendampingan Koperasi sebagai Koordinator Penanggung Jawab Penyaluran KUT oleh LSM.
- 1.7. Kantor Departemen /Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kotamadia (Pengecekan Rekapitulasi RDKK dan Pemberi Persetujuan Pencairan KUT)
- 1.8. Kelompok Tani/Petani (Penerima KUT)
- 1.9. Satuan Pembina Bimas (Satpem), Satuan Pelaksana Bimas (Satpel) dan Satuan Penggerak Bimas Kecamatan/Desa.

2. Persyaratan LSM sebagai Pemberi KUT :

- 2.1. Sudah berBadan Hukum (Akte Notaris)
- 2.2. Memiliki Pengurus Aktif
- 2.3. Terdaftar dan tergabung dalam BKSLP5K di Tingkat Propinsi.
- 2.4. Terdaftar pada Koordinator Nasional BKSLP5K dan penyampaian nama-nama oleh Departemen Koperasi, PK dan Menengah RI kepada Bank Indonesia, Bank Pelaksana, Departemen/Dinas Koperasi, PK dan Menengah di daerah dan Instansi terkait.

3. Mekanisme dan Pengendalian KUT

- 3.1. RDKK disusun oleh Kelompok tani sendiri dengan seluruh anggota petani baik yang mengajukan KUT maupun yang tidak mengajukan.
- 3.2. Penyusunan RDKK dibawah bimbingan PPL dan PPL bertanggung jawab atas kebenaran RDKK.
- 3.3. Kandep/Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kotamadia mengecek rekapitulasi RDKK yang telah disyahkan kebenarannya oleh PPL dan menetapkan persetujuan pemberian KUT.
- 3.4. Pihak-pihak penentu persetujuan KUT harus mengetahui dan menguasai luas areal/lahan di masing-masing Dusun/Desa.

V. Kendala-kendala dan Upaya Penyelesaiannya :

5.1. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyerapan KUT di Jawa Timur, yaitu masih adanya tunggakan KUT yang akan menghambat penyerapan KUT oleh Kelompok tani/Petani.

No	Musim Tanam	Realisasi (Rp. 000,-)	Tunggakan	
			(Rp. 000,-)	%
1	MT. 1995/1996	34.043.388	5.600.610	16,45
2	MT. 1996	3.879.457	381.241	9,83
3	MT. 1996/1997	31.785.154	5.317.580	16,73
4	MT. 1997	3.009.588	292.012	9,70
5	MT. 1997/1998	31.838.174	3.814.107	11,98
6	MT. 1998	30.691.703	4.112.612	13,40
7	MT. 1998/1999	1.123.597.509	1.021.549.033	90,92

5.2. Upaya Penyelesaian

- Memotivasi Koperasi/LSM dan Kelompok Tani/Petani untuk menyelesaikan hutang/tunggakan KUT pada saat panen usaha taninya.
- Memerintahkan kepada Koperasi/LSM/Kelompok Tani/Petani untuk segera mengembalikan KUT yang direalisasi ke Bank Pelaksana, jika tidak dimanfaatkan untuk membiayai usahataniannya.
- Meminta kepada Camat dan Kepala Desa selaku Ketua Satuan Penggerak Bimas Tingkat Kecamatan/Desa untuk memasang data di papan informasi/pengumuman di kantor Camat dan Kantor Desa tentang Petani/Kelompok Tani/Koperasi/LSM yang menerima KUT.
- Menindak dengan tegas terhadap oknum-oknum yang menyalahgunakan dana KUT yang tidak dimanfaatkan untuk membiayai usaha taninya dalam rangka Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura.

ALOKASI PLAFOND KUT TP. 1998/1999 DI JAWA TIMUR

No	Komoditas	MT. 1998/1999		MT. 1999		TP. 1998/1999	
		Areal (Ha)	Plafond (Rp. Juta)	Areal (Ha)	Plafond (Rp. Juta)	Areal (Ha)	Plafond (Rp. Juta)
1	Tan. Pangan						
	- Padi	1.159.060	634.006	479.400	262.232	1.638.460	896.238
	- Jagung	850.470	387.389	335.850	152.979	1.186.320	540.368
	- Kedelai	182.470	82.933	261.560	118.879	444.030	201.812
	Jumlah (1)	2.192.000	1.104.328	1.076.810	534.090	3.268.810	1.638.418
2	Tan Hortikultura	37.465	196.994	29.388	82.691	66.853	279.685
	Jumlah (1+2)	2.229.465	1.301.322	1.106.193	616.781	3.335.663	1.918.103

25-plafond